

**PENGARUH KINERJA KEUANGAN TERHADAP
EFISIENSI PENDAPATAN ASLI DAERAH
KABUPATEN MAMUJU UTARA**

SKRIPSI

*Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Syarat Guna Mencapai Gelar Sarjana
Ekonomi Pada Jurusan Manajemen Fakultas Ekonomi*



Diajukan Oleh:

Aspar. N

45 11 012 065

**PROGRAM STUDI MANAJEMEN FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS BOSOWA MAKASSAR**

2018

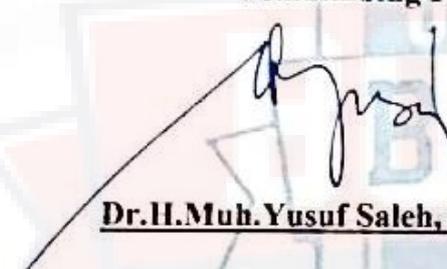
HALAMAN PENGESAHAN

1. **Judul** : Pengaruh Kinerja Keuangan Terhadap Efisiensi
Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Mamuju
Utara
2. **Nama Mahasiswa** : Asfar. N
3. **Nomor Stambuk** : 45 11 012 065
4. **Fakultas** : Ekonomi
5. **Program Studi** : Manajemen
6. **Tempat Penelitian** : Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Mamuju
Utara

Menyetujui :

Pembimbing I

Pembimbing II


Dr. H. Muh. Yusuf Saleh, SE., M.Si


Haeruddin Saleh, SE., M.Si

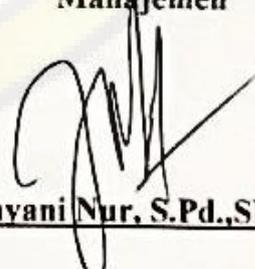
MENGETAHUI DAN MENGESAHKAN:

*Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Syarat Guna Mencapai Gelar Sarjana
Ekonomi Pada Jurusan Manajemen Fakultas Ekonomi
Universitas Bosowa Makassar*

**Dekan Fakultas Ekonomi
Universitas Bosowa Makassar**

**Ketua Program Studi
Manajemen**


Dr. H. A. Arifuddin Mane, SE, SH, M.Si, MH


Indrayani Nur, S.Pd., SE., M.Si

Tanggal Pengesahan :

Pernyataan Keorisinalan Skripsi

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Aspar. N

Stambuk : 45 11 012 065

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang saya tulis ini benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, bukan merupakan pengambil alihan atau pemikiran orang lain. Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan maka saya bersedia mempertanggung jawabkan sekaligus bersedia menerima sanksi yang seberat-beratnya atas perbuatan tidak terpuji tersebut.

Demikian pernyataan ini saya buat dalam keadaan sadar dan tanpa paksaan sama sekali.

Makassar, Januari 2018




Aspar. N

ABSTRAK

Asfar.N. 2018. *Pengaruh Kinerja Keuangan Terhadap Efisiensi Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Mamuju Utara*. Skripsi. Jurusan Manajemen. Fakultas Ekonomi. Universitas Bosowa. Pembimbing 1. Muh Yusuf Saleh. Pembimbing II. Haeruddin Saleh.

Otonomi daerah (otoda) adalah kewenangan daerah untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Salah satu aspek dari pemerintah daerah yang harus diatur secara hati-hati adalah pengelolaan keuangan daerah. Untuk menganalisis kinerja pemerintah daerah dalam mengelola keuangan daerah dapat dilakukan dengan analisis rasio keuangan. Adapun rasio keuangan yang digunakan meliputi: rasio kemandirian, rasio efektifitas, rasio pertumbuhan, dan rasio efisiensi PAD.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui kinerja keuangan daerah Pemkab Mamuju Utara berpengaruh signifikan terhadap efisiensi penggunaan PAD. Populasi dalam penelitian ini, yaitu Laporan Realisasi Anggaran Pemkab Mamuju Utara di mana sampel yang diambil adalah delapan tahun terakhir (2009-2016). Adapun variabel yang diteliti meliputi rasio kemandirian, rasio efektifitas, dan rasio pertumbuhan sebagai variabel bebas (independen) serta efisiensi PAD sebagai variabel terikat (dependen).

Hasil analisis regresi menunjukkan bahwa rasio kemandirian, rasio efektifitas, dan rasio pertumbuhan berpengaruh signifikan terhadap efisiensi PAD dari tahun 2009-2016 terbukti dari nilai probabilitas $0,009 < 0,05$. Secara parsial, rasio kemandirian berpengaruh signifikan terhadap efisiensi PAD. Namun, rasio efektifitas dan rasio pertumbuhan tidak berpengaruh signifikan terhadap efisiensi PAD

Kata Kunci:

Rasio Kemandirian, Rasio Efektifitas, RasioPertumbuhan, Rasio Efisiensi, Pendapatan Asli Daerah (PAD)

ABSTRACT

Asfar.N. 2018. *The Effect of Financial Performance on Local Own Revenue Efficiency of North Mamuju Regency*. Essay. Management major. Faculty of Economics, University of Bosowa. Advisors I. Muh Yusuf Saleh. Advisor II. Haeruddin Saleh.

Regional autonomy (autonomy) is the regional authority to regulate and manage the interests of local people according to their own initiatives based on the aspirations of the people and in accordance with the prevailing laws and regulations. One aspect of local government that must be carefully regulated is the management of regional finances. To analyze the performance of local governments in managing local finances can be done with the analysis of financial ratios. The financial ratios used include: independence ratio, effectiveness ratio, growth ratio, and PAD efficiency ratio. The purpose of this study is to determine the financial performance of North Mamuju Regency significantly influence the efficiency of PAD use. The population in this study, the Budget Realization Report of North Mamuju Regency where the sample is the last eight years (2009-2016). The variables studied include independence ratios, effectiveness ratios, and growth ratios as independent (independent) variables and PAD efficiencies as dependent variables. The result of regression analysis shows that independence ratio, effectiveness ratio, and growth ratio have significant effect to PAD efficiency from 2009-2016 proved from probability value $0,009 < 0,05$. Partially, independence ratio has significant effect to PAD efficiency. However, the ratio of effectiveness and growth ratio has no significant effect on PAD efficiency.

Keywords: Independence Ratio, Effectiveness Ratio, Growth Ratio, Efficiency Ratio, Local Original Revenue (PAD)

KATA PENGANTAR

"Bismillahirrahmanirrahim"

Puji syukur kehadirat Allah SWT karena berkat-Nya sehingga skripsi yang berjudul "**Pengaruh Kinerja Keuangan Terhadap Efisiensi Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Mamuju Utara**" dapat diselesaikan oleh peneliti.

Peneliti menyadari sepenuhnya bahwa masih terdapat banyak kekurangan dalam skripsi ini, walaupun telah diusahakan secara maksimal. Namun, peneliti berharap agar skripsi ini dapat berguna untuk menambah pengetahuan pembaca tentang kinerja keuangan daerah, khususnya daerah Kabupaten Mamuju Utara.

Saya pun tidak lupa mengucapkan banyak terima kasih kepada kedua Orang tua saya tercinta dan ke tiga saudara saya yang saya sayangi yang tiada hentinya memberikan do'a serta dukungan yang senantiasa tercurah dalam penyusunan skripsi ini.

Serta semua pihak yang telah membantu, baik secara moril maupun materil dalam penelitian dan dalam penyusunan skripsi ini. Sehubungan dengan hal tersebut, peneliti merasa perlu untuk mengucapkan banyak terima kasih kepada:

1. Bapak **Prof. Dr. M. Saleh Pallu, M.eng** selaku Rektor Universitas Bosowa Makassar.
2. Bapak **Dr. H. A. Arifuddin Mane, SE, SH, M.Si., MH** Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Bosowa Makassar.
3. Ibunda **Dr. Hj. Herminawaty Abu Bakar, SE., MM** Selaku Wakil Dekan I Fakultas Ekonomi Universitas Bosowa Makassar.

4. Ibunda **Indrayani Nur, S.Pd., SE., M.Si** selaku Ketua Jurusan Manajemen yang telah memberikan banyak partisipasinya.
5. Bapak **Dr. H. M. Yusuf Saleh, SE., M.Si** selaku Dosen Pembimbing 1 yang telah memberikan arahan-arahan dalam proses penyusunan proposal hingga skripsi.
6. Bapak **Haeruddin Saleh, SE., M.Si** selaku Dosen Pembimbing II yang telah memberikan bimbingannya selama penyusunan proposal hingga skripsi.
7. Bapak **Kepala DPPKAD** Kabupaten Mamuju Utara, serta segenap staf yang telah mengizinkan dan membantu dalam proses penelitian
8. Teman-teman seperjuangan **Moneter 2011** serta senior yang saling *sharing* dalam penyelesaian proposal dan skripsi.

Segala kritik dan saran dari semua pihak yang sifatnya membangun sangat peneliti harapkan sebagai upaya penyempurnaan skripsi ini.

Makassar, Januari 2018

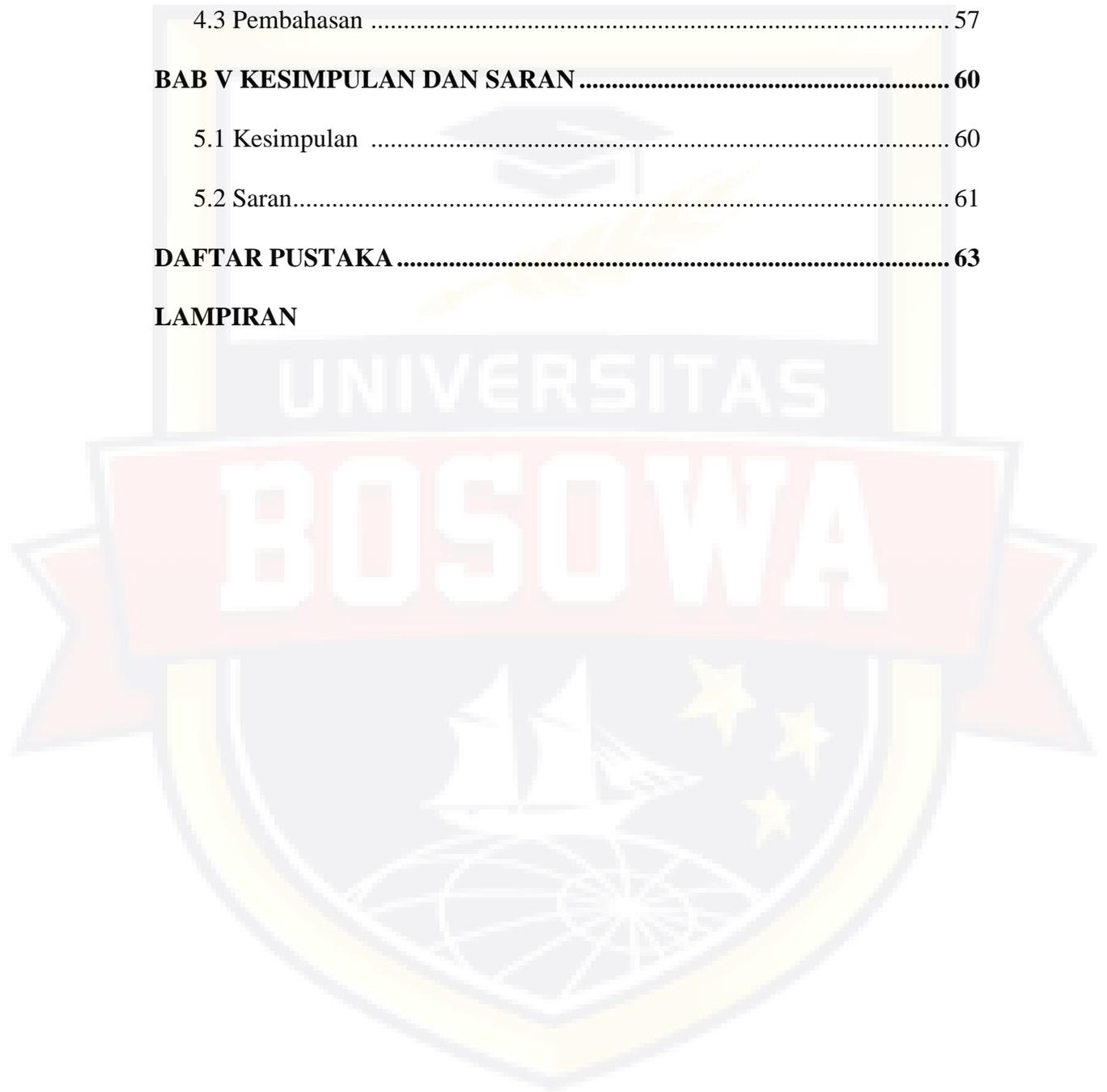
Peneliti

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
PERNYATAAN KEORISINILAN SKRIPSI.....	iii
ABSTRAK	iv
ABSTRACT.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR TABEL.....	xi
DAFTAR GAMBAR.....	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	4
1.3 Tujuan Penelitian	5
1.4 Manfaat Penelitian	5
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	6
2.1 Kerangka Teori	6
2.1.1 Definisi Laporan Keuangan	6
2.1.2 Tujuan Laporan Keuangan	6
2.1.3 Komponen – Komponen Keuangan.....	7
2.1.4 Definisi Kinerja	10
2.1.5 Definisi Pengukuran Kinerja.....	10
2.1.6 Aspek Pengukuran Kinerja	11

2.1.7 Tujuan Pengukuran Kinerja	12
2.1.8 Definisi Indikator Kinerja	13
2.1.9 Penyusunan Indikator Kinerja.....	14
2.1.10 Penelitian Terdahulu	15
2.1.11 Analisis Rasio Keuangan	17
2.1.12 Kegunaan Analisis Rasio Keuangan.....	18
2.2 Kerangka Pikir	21
2.3 Hipotesis	23
BAB III METODE PENELITIAN	24
3.1 Tempat Dan Waktu Penelitian	24
3.2 Metode Pengumpulan Data	24
3.3 Jenis Dan Sumber Data	25
3.3.1 Jenis Data	25
3.3.2 Sumber Data	25
3.4 Variabel Penelitian	25
3.5 Metode Analisis	29
3.5 Definisi Operasional	32
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	35
4.1 Gambaran Umum	35
4.1.1 Letak Geografis Kabupaten Mamuju	35
4.1.2 Letak Administratif.....	35
4.1.3 Tugas Dan Fungsi Unit Kerja DPPKD Mamuju Utara.....	36
4.2 Hasil Analisis	49

4.2.1 Gambaran Umum Variabel Penelitian	49
4.2.2 Uji Hipotesis	55
4.3 Pembahasan	57
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	60
5.1 Kesimpulan	60
5.2 Saran.....	61
DAFTAR PUSTAKA	63
LAMPIRAN	



DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 Operasionalisasi Variabel	28
Tabel 5.1 Perhitungan Rasio Kemandirian Kabupaten Mamuju Utara	
Tahun Anggaran 2009-2010	50
Tabel 5.2 Perhitungan Rasio Efektifitas Pendapatan Asli Daerah	
Tahun Anggaran 2009-2016	51
Tabel 5.3 Perhitungan Rasio Pertumbuhan APBD Kabupaten Mamuju	
Utara Tahun Anggaran 2009-2016	53
Tabel 5.4 Perhitungan Rasio Efisiensi Pendapatan Asli Daerah	
Tahun Anggaran 2009-2016	54
Tabel 5.5 Hasil Analisis Regresi	55
Tabel 5.6 Hasil Uji F (Stimulan).....	57

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Lahirnya Undang-Undang (UU) No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Pemda) dan UU No. 33 Tahun 2004 tentang Penimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, menjadi titik awal dimulainya otonomi daerah. Otonomi daerah (otoda) adalah kewenangan daerah otonomi untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai peraturan perundang-undangan. Sedangkan perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah merupakan pemerataan antar daerah secara proporsional, demokratis, adil, dan transparan dengan memperhatikan potensi, kondisi, dan kebutuhan daerah sejalan dengan kewajiban dan pembagian kewenangan tersebut, termasuk pengelolaan dan pengawasan keuangannya.

Adanya Undang-Undang tersebut telah memberi kewenangan yang lebih luas kepada Perda tingkat kabupaten untuk menyelenggarakan semua urusan pemerintah mulai dari perencanaan, pengendalian dan evaluasi, sehingga mendorong Pemda untuk lebih memberdayakan semua potensi yang dimiliki dalam rangka membangun dan mengembangkan daerahnya. Sebenarnya pertimbangan mendasar terselenggaranya otoda adalah perkembangan dari dalam negeri yang mengindikasikan bahwa rakyat menghendaki keterbukaan dan kemandirian (*desentralisasi*). Selain itu, keadaan luar negeri yang banyak menunjukkan bahwa semakin maraknya globalisasi yang menuntut daya saing tiap

negara, termasuk setiap Pemdanya. Hal tersebut akan tercapai dengan peningkatan kemandirian Pemda melalui program otda. Tujuan program otda adalah mempercepat pertumbuhan ekonomi dan perkembangan daerah dan meningkatkan kualitas pelayanan publik agar lebih efisien dan responsif terhadap kebutuhan potensi maupun karakteristik di daerah masing-masing.

Salah satu aspek dari Pemda yang harus diatur secara hati-hati adalah pengelolaan keuangan daerah dan anggaran daerah. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah suatu rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan berdasarkan peraturan daerah. (Nordiawan, dkk, 2011: 39)

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan instrument kebijakan yang utama bagi Pemda. Sebagai instrumen kebijakan, APBD mendukung posisi sentral dalam upaya pengembangan kapabilitas dan efektivitas Pemda. APBD dapat digunakan sebagai alat untuk menentukan besarnya pendapatan dan pengeluaran, membantu pengambilan keputusan dan pencapaian pembangunan, otoritas pengeluaran di masa-masa yang akan datang, sumber pengembangan ukuran-ukuran standar untuk evaluasi kinerja, alat untuk memotivasi para pegawai dan alat koordinasi bagi semua aktivitas dari berbagai unit kerja.

Secara spesifik, tujuan pelaporan keuangan oleh Pemda adalah untuk menyajikan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan dan untuk menunjukkan akuntabilitas (pertanggungjawaban) Pemda atas sumber yang dipercayakan. Pemda sebagai pihak yang diserahi tugas untuk menjalankan roda

pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan masyarakat wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban keuangan daerahnya untuk dinilai apakah ia berhasil menjalankan tugasnya dengan baik atau tidak. Salah satu alat untuk menganalisis kinerja Pemda dalam mengelola keuangan daerahnya adalah dengan melakukan analisis rasio keuangan terhadap APBD yang telah dilaksanakan.

Hasil analisis rasio keuangan digunakan sebagai tolak ukur dalam :

1. Menilai kemandirian keuangan daerah dalam membiayai penyelenggaraan otda.
2. Mengukur efektivitas dan efisiensi dalam merealisasikan pendapatan daerah.
3. Mengukur sejauh mana aktivitas Pemda dalam membelanjakan pendapatan daerahnya.
4. Mengukur kontribusi masing-masing sumber pendapatan dalam pembentukan pendapatan daerah.
5. Melihat pertumbuhan dan perkembangan perolehan pendapatan dan pengeluaran yang dilakukan selama periode waktu tertentu.

Penggunaan analisis rasio pada sektor publik, khususnya terhadap APBD dan realisasinya belum banyak dilakukan sehingga secara teori belum ada kesepakatan secara bulat mengenai nama dan kaidah peraturannya. Namun, analisis rasio terhadap realisasi APBD harus dilakukan untuk meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah.

Di samping meningkatkan kuantitas pengelolaan keuangan daerah, analisis rasio terhadap realisasi APBD juga dapat digunakan sebagai alat untuk Menilai efektivitas otda sebab kebijakan ini yang memberikan keleluasaan bagi Pemda

untuk mengelola keuangan daerahnya seharusnya bisa meningkatkan kinerja keuangan daerah yang bersangkutan. Maraknya pembahasan mengenai keuangan daerah, terutama hubungannya dengan otda yang sementara berlangsung menjadikan hal ini menarik untuk dibahas.

Peneliti memilih salah satu Kabupaten di Provinsi Sulawesi Barat, yaitu Kabupaten Mamuju Utara, Kabupaten ini menjadi menarik sebagai salah satu obyek penelitian karena adanya temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Sulawesi Barat mengenai penggunaan APBD Kabupaten Mamuju Utara 2016 yang bermasalah. Dana tersebut direalisasikan untuk beberapa kegiatan, seperti belanja hibah, bantuan sosial, dan transfer/bagi hasil ke desa yang belum dipertanggung jawabkan penggunaannya.

Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dan membuktikan kemampuan Pemerintah Daerah Mamuju Utara dalam mengelola keuangan daerahnya dan melihat dari efisiensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan mengangkat judul, **“Pengaruh Kinerja Keuangan terhadap Efisiensi Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Mamuju Utara”**.

1.2 Masalah Pokok

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini, antara lain:

1. Bagaimana gambaran efisiensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pemkab Mamuju Utara dalam delapan tahun terakhir (2009-2016)?

2. Apakah kinerja keuangan daerah Pemkab Mamuju Utara berpengaruh positif dan signifikan terhadap efisiensi penggunaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam delapan tahun terakhir (2009-2016)?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai sehubungan dengan penelitian ini. antara lain:

1. Untuk mengetahui gambaran efisiensi PAD Pemkab Mamuju Utara dalam delapan tahun terakhir (2009-2016).
2. Untuk mengetahui kinerja keuangan daerah Pemkab Mamuju Utara berpengaruh signifikan terhadap efisiensi penggunaan PAD dalam delapan tahun terakhir (2009-2016).
3. Untuk mempengaruhi kinerja keuangan daerah Pemerintah Kabupaten Mamuju Utara berpengaruh signifikan terhadap efisiensi penggunaan PAD

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diperoleh dari penulis proposal ini adalah:

1. Diharapkan hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan informasi, perbandingan, dan bahan acuan bagi instansi pemerintahan dalam rangka upaya peningkatan kinerja Pemerintah Kabupaten Mamuju.
2. Diharapkan melalui penelitian ini dapat menambah khasanah ilmu pengetahuan, khususnya mengenai kinerja keuangan daerah.
3. Sebagai salah satu persyaratan yang harus di penuhi dalam menyelesaikan tugas akhir jurusan Manajemen di Fakultas Ekonomi Universitas Bosowa Makassar.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Kerangka Teori

2.1.1 Definisi Laporan Keuangan

Kieso dkk. (2012:3) menjelaskan bahwa laporan keuangan merupakan sarana pengomunikasian informasi keuangan utama kepada pihak-pihak di luar korporasi. Laporan ini melampirkan sejarah perusahaan yang dikuantitatifkan dalam nilai moneter.

Laporan keuangan merupakan bagian dari proses pelaporan keuangan. Laporan keuangan yang lengkap biasanya meliputi neraca, laporan laba rugi, laporan perubahan posisi keuangan (yang dapat disajikan dalam berbagai cara misalnya laporan arus kas, atau laporan arus dana), catatan dan laporan lain serta materi penjelasan yang merupakan bagian integral dari laporan keuangan.

2.1.2 Tujuan Laporan Keuangan

Mardiasmo (2011:162), tujuan umum laporan keuangan bagi organisasi pemerintahan adalah:

1. Untuk memberikan informasi yang digunakan dalam pembuatan keputusan ekonomi, sosial dan politik serta sebagai bukti pertanggung jawaban (*accountability*) dan pengelolaan (*stewardship*).
2. Untuk memberikan informasi yang digunakan untuk mengevaluasi kinerja manajerial dan organisasional.

Secara spesifik, tujuan pelaporan keuangan pemerintah adalah untuk menyajikan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan dan untuk

menunjukkan akuntabilitas entitas pelaporan sumber daya yang dipercayakan kepadanya, dengan:

1. Menyediakan informasi mengenai posisi sumber daya ekonomi, kewajiban, dan ekuitas dana pemerintah.
2. Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi sumber daya ekonomi, kewajiban dan ekuitas dana pemerintah.
3. Menyediakan informasi mengenai sumber, alokasi, dan penggunaan sumber daya ekonomi.
4. Menyediakan informasi mengenai kelantan realisasi terhadap anggarannya.
5. Menyediakan informasi mengenai cara entitas pelaporan mendanai aktivitasnya dan memenuhi kebutuhan kasnya.
6. Menyediakan informasi mengenai potensi pemerintah untuk membiayai penyelenggaraan kegiatan pemerintahan.
7. Menyediakan informasi yang berguna untuk mengevaluasi kemampuan entitas pelaporan dalam mendanai aktivitasnya.

2.1.3 Komponen-komponen Laporan Keuangan

Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, komponen-komponen yang terdapat dalam suatu laporan keuangan pokok adalah :

1. Laporan Realisasi Anggaran mengungkapkan kegiatan keuangan pemerintah pusat/daerah yang menunjukkan ketaatan terhadap APBN/APBD. Laporan Realisasi Anggaran menyajikan ikhtisar sumber, aplikasi dan penggunaan sumber daya ekonomi yang dikelola oleh pemerintah pusat/daerah dalam satu

periode pelaporan. Dalam Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, disebutkan unsur yang dicakup

dalam Laporan Realisasi Anggaran terdiri dari :

- a. Pendapatan adalah semua penerimaan kas daerah yang menambah ekuitas dana dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak Pemda, dan tidak perlu dibayar kembali oleh Pemda.
 - b. Belanja adalah semua pengeluaran kas daerah yang mengurangi ekuitas dana dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan, dan tidak akan diperoleh kembali pembayarannya oleh Pemda.
 - c. Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya, yang dalam penganggaran Pemda terutama dimaksudkan untuk menutupi defisit atau memanfaatkan surplus anggaran.
2. Neraca menggambarkan posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas dana pada tanggal tertentu. Masing-masing unsur didefinisikan sebagai berikut :
- a. Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh Pemda sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh.
 - b. Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemberdayaan daerah.

c. Ekuitas dana adalah kekayaan bersih Pemda yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban Pemda.

3. Catatan atas laporan keuangan meliputi penjelasan atau daftar terinci atau analisis atau nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, dan Laporan Arus Kas. Catatan atas laporan keuangan juga mencakup informasi tentang kebijakan akuntansi yang dipergunakan oleh entitas pelaporan dan informasi lain yang diharuskan dan dianjurkan untuk diungkapkan di dalam standar akuntansi pemerintahan serta ungkapan-ungkapan yang diperlukan untuk menghasilkan penyajian laporan keuangan secara wajar. Catatan atas laporan keuangan disajikan secara sistematis. Setiap pos dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, dan Laporan Arus Kas harus memiliki referensi silang dengan informasi terkait dalam catatan atas laporan keuangan. Catatan atas laporan keuangan terdiri dari hal-hal sebagai berikut:

- a. Menyajikan informasi tentang ekonomi makro, kebijakan fiskal dan pencapaian target Perda APBD, serta kendala yang dihadapi dalam pencapaian target.
- b. Menyajikan ikhtisar pencapaian kinerja selama tahun pelaporan.
- c. Menyajikan informasi tentang dasar penyusunan laporan keuangan dan kebijakan-kebijakan akuntansi yang dipilih untuk diterapkan atas transaksi-transaksi dan kejadian-kejadian penting lainnya.
- d. Menyediakan informasi tambahan yang diperlukan untuk penyajian yang wajar, yang tidak disajikan dalam lembar muka laporan keuangan.

2.1.4 Definisi Kinerja

Bastian (2012:274) memaparkan pengertian kinerja sebagai gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan atau program atau kebijaksanaan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi, dan visi organisasi yang tertuang dalam perumusan perencanaan strategis (*strategic planning*) suatu organisasi. Secara umum, kinerja merupakan prestasi yang dapat dicapai oleh organisasi dalam periode tertentu.

Menurut Simamora (2012:45) Kinerja adalah ukuran keberhasilan organisasi dalam mencapai misinya. Sedangkan Shadily (2011:425), mengatakan kinerja atau performance adalah berdaya guna prestasi atau hasil. Wahyudi Kumorotomo (2011) memberikan batasan pada konsep kinerja organisasi public setidaknya berkaitan erat efisiensi, efektifitas, keadilan dan daya tanggap.

Hal ini berarti bahwa performance adalah sebuah tindakan yang dapat dilihat, diamati serta kemungkinan untuk mencapai hal-hal yang diharapkan (tujuan). Kinerja juga dapat dikatakan kombinasi dari kemampuan, usaha dan kesempatan yang dapat dilihat dari hasil kerjanya yang diperoleh.

2.1.5 Definisi Pengukuran Kinerja

Dalam mengukur keberhasilan atau kegagalan suatu organisasi, seluruh aktivitas organisasi tersebut harus dapat dicatat dan diukur. Pengukuran ini tidak hanya dilakukan pada masukan (*input*) program, tetapi juga pada keluaran (*output*) dari program tersebut.

Ukuran kinerja dan indikator kinerja merupakan dua istilah yang berbeda. Ukuran kinerja mengacu pada penilaian kinerja secara langsung, sedangkan

indikator kinerja mengacu pada penilaian secara tidak langsung, yaitu hal-hal yang sifatnya hanya merupakan indikasi-indikasi kinerja.

2.1.6 Aspek Pengukuran Kinerja

Sesuai dengan publikasi Pengukuran Kinerja Instansi Pemerintah oleh Lembaga Administrasi Negara (LAN) Jakarta, maka pengukuran kinerja sangat terkait dengan aspek-aspek yang dijelaskan sebagai berikut :

1. Aspek finansial, terdiri atas belanja rutin dan belanja pembangunan dari setiap instansi pemerintahan.
2. Aspek kepuasan pelanggan (*customers*), yaitu bagaimana instansi pemerintah merespon tuntutan masyarakat atas pelayanan yang berkualitas dengan memberikan pelayanan yang prima secara terus-menerus
3. Aspek operasi bisnis internal, ditujukan untuk informasi bisnis internal guna memastikan bahwa kegiatan pemerintah sudah seirama (*in-concert*) dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran organisasi seperti yang tercantum dalam rencana strategis.
4. Aspek kepuasan pegawai, dalam setiap organisasi pegawai merupakan aset yang harus dikelola dengan baik, terutama dalam organisasi yang banyak melakukan inovasi dan peran strategis.
5. Aspek kepuasan komunitas dan stakeholders. Informasi dan pengukuran kinerja harus didesain untuk mengakomodasi kepuasan komunitas dan para pihak-pihak yang berkepentingan (*stakeholders*).

6. Aspek waktu. Ukuran waktu merupakan variabel penting dalam desain pengukuran kinerja untuk kebutuhan perputaran informasi yang cepat dalam rangka membantu pengambilan keputusan yang cepat dan tepat.

2.1.7 Tujuan Pengukuran Kinerja

Pengukuran kinerja merupakan manajemen pencapaian kinerja. Pengukuran kinerja secara berkelanjutan akan memberikan umpan balik (*feed back*) sehingga upaya perbaikan secara terus-menerus akan mencapai keberhasilan di masa mendatang.

Pengukuran kinerja merupakan alat manajemen untuk :

1. Memastikan pemahaman para pelaksana dan ukuran yang digunakan untuk pencapaian kinerja
2. Memastikan tercapainya skema yang disepakati.
3. Memonitor dan mengevaluasi kinerja dan membandingkannya dengan skema kerja serta melakukan tindakan untuk memperbaiki kinerja.
4. Memberikan penghargaan dan hukuman yang objektif atas kinerja yang dicapai setelah dibandingkan dengan indikator kinerja yang telah disepakati.
5. Menjadikan alat komunikasi antara bawahan dan pimpinan dalam upaya memperbaiki kinerja organisasi.
6. Mengidentifikasi apakah kepuasan pelanggan sudah terpenuhi.
7. Membantu memahami proses kegiatan instansi pemerintah.
8. Memastikan bahwa pengambilan keputusan dilakukan secara objektif.
9. Menunjukkan peningkatan yang perlu dilakukan.
10. Mengungkapkan permasalahan yang terjadi.

2.1.8 Definisi Indikator Kinerja

Indikator kinerja adalah ukuran kuantitatif dan kualitatif menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan dengan memperhatikan:

1. Indikator masukan (*input*), yaitu segala sesuatu yang dibutuhkan agar pelaksanaan kegiatan dapat berjalan untuk menghasilkan keluaran (*output*).
2. Indikator keluaran (*output*), adalah segala sesuatu yang diharapkan langsung dicapai dari suatu kegiatan yang dapat berupa fisik dan/atau nonfisik.
3. Indikator hasil (*outcome*), adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran (*output*) kegiatan pada jangka menengah (efek langsung).
4. Indikator manfaat (*benefit*), adalah sesuatu yang terkait dengan tujuan dari pelaksanaan kegiatan.
5. Indikator dampak (*impacts*) adalah pengaruh yang ditimbulkan, baik positif maupun negatif terhadap setiap tingkatan indikator didasarkan asumsi yang telah ditetapkan.

Dengan demikian, indikator kinerja harus merupakan sesuatu yang dapat diukur dan digunakan sebagai dasar untuk menilai kinerja, baik pada tahap perencanaan, tahap pelaksanaan maupun setelah kegiatan selesai. Indikator kinerja juga dapat digunakan untuk melihat kemajuan dalam hal pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan oleh organisasi instansi pemerintahan.

2.1.9 Penyusunan Indikator Kinerja

Dalam modul Lembaga Administrasi Negara (LAN) dan Badan Pengawasan Keuangan Pemerintah (BPKP) (2010:10) dijelaskan bahwa sebelum menyusun dan menetapkan indikator kinerja terlebih dahulu perlu diketahui syarat-syarat dalam penyusunan indikator kinerja. Syarat-syarat tersebut adalah sebagai berikut :

1. Spesifikasi dan jelas sehingga mudah dipahami dan meminimalisasi kemungkinan kesalahan interpretasi.
2. Dapat diukur secara objektif, baik yang bersifat kuantitatif maupun kualitatif, yaitu dua atau lebih yang mengukur indikator kinerja mempunyai kesimpulan yang sama.
3. Relevan, indikator kinerja harus menangani aspek-aspek objektif yang relevan.
4. Dapat dicapai dan bermanfaat untuk menunjukkan keberhasilan masukan, keluaran, hasil, manfaat, dan dampak.
5. Efektif, data yang digunakan berkaitan dengan indikator kinerja yang bersangkutan, dapat dikumpulkan, diolah, dan dianalisis dengan biaya yang tersedia

Ada beberapa langkah yang perlu dilakukan untuk penyusunan dan penetapan indikator kinerja pemerintah, yaitu sebagai berikut:

1. Susun dan tetapkan rencana strategis terlebih dahulu. Rencana strategis meliputi visi, misi, tujuan, sasaran, dan cara mencapai tujuan/sasaran (kebijaksanaan, program dan kegiatan),

2. Identifikasi data/informasi yang dapat dikembangkan menjadi indikator kinerja.

Dalam hal ini, data/ informasi yang relevan, lengkap, akurat, dan kemampuan pengetahuan tentang bidang yang akan dibahas untuk menyusun dan menetapkan indikator kinerja yang tepat dan relevan.

3. Pilih dan tetapkan indikator kinerja yang paling relevan dan berpengaruh besar terhadap keberhasilan pelaksanaan kebijakan/program

2.1.10 Penelitian Terdahulu

Hasil-hasil penelitian sebelumnya dapat digunakan sebagai acuan dalam penelitian ini. Beberapa penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan keuangan daerah, antara lain:

Maharani (2012) melakukan penelitian di Kantor Dinas Pendapatan Kota Batu. Jenis penelitian berupa studi kasus dan data yang digunakan adalah data sekunder berupa dokumen dan catatan Pemda Kota Batu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kinerja tingkat kemandirian Pemda Kota Batu rasio kemandirian mengalami penurunan yang berarti Pemda Kota Batu cenderung memiliki ketergantungan finansial yang sangat tinggi kepada pemerintah pusat. Hal ini dapat dilihat dari kontribusi PAD terhadap total APBD yang masih relatif kecil dan sumber pembiayaan utama masih bersumber dari dana Perimbangan Pemerintah Pusat.

Sakti (2011) meneliti tentang analisis perkembangan kemampuan keuangan daerah dalam mendukung pelaksanaan otonomi daerah (studi empiris di Kabupaten Sukoharjo). Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan beberapa rasio keuangan, seperti rasio kemandirian keuangan daerah, indeks kemampuan

rutin, rasio keserasian, dan rasio pertumbuhan. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa perkembangan keuangan di Kabupaten Sukoharjo di sector keuangan masih kurang. Untuk itu diperlukan upaya untuk peningkatan PAD, baik secara ekstensifikasi yaitu pemerintah daerah harus dapat mengidentifikasi potensi daerah sehingga peluang-peluang baru untuk sumber penerimaan daerah dapat dicari, sedangkan secara intensifikasi dengan memperbaiki kinerja pengelolaan pemungutan pajak.

Yanti (2011) meneliti tentang analisis rasio sebagai indikator kinerja keuangan pemerintah Kabupaten Mamuju Utara. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan beberapa analisis rasio untuk mengukur indikator kinerja keuangan daerah, seperti rasio kemandirian keuangan daerah, rasio efektifitas dan efisiensi pendapatan asli daerah, rasio aktivitas (rasio keserasian), *debt service coverafe ratio* (DSCR), dan rasio pertumbuhan. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa kemampuan Pemda Kabupaten Mamuju Utara dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan dan pembangunan serta pelayanan masyarakat dapat dikatakan memiliki kinerja yang positif.

Yuniarti (2011) meneliti tentang analisis kemampuan keuangan daerah Kabupaten Situbondo di era otonomi daerah tahun 2001-2010. Dalam penelitian ini ada beberapa indikator yang digunakan sebagai alat analisis seperti rasio kemampuan keuangan daerah, rasio indeks kemampuan rutin, dan rasio pertumbuhan. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Kabupaten Situbondo mengalami pertumbuhan yang cukup signifikan. Namun, rasio kemampuan

keuangan daerah dan indeks kemampuan rutin masih kurang dari yang diharapkan.

2.1.11 Analisis Rasio Keuangan

Analisis dari item-item laporan keuangan berperan penting dalam interpretasi data keuangan dan operasi entitas. Karena itu, banyak analisis yang memanfaatkan rasio keuangan untuk membantu melakukan kegiatan analisis dan interpretasi laporan keuangan. Penggunaan laporan keuangan sebagai alat analisis dapat membantu pihak pembuat kebijakan untuk membuat kebijakan yang rasional dan sesuai dengan tujuan entitas karena analisis rasio dapat membantu dalam mengidentifikasi beberapa kekuatan dan kelemahan keuangan entitas. Dengan kata lain, rasio keuangan adalah penulisan ulang data akuntansi ke dalam bentuk perbandingan dalam rangka mengidentifikasikan kekuatan dan kelemahan keuangan. Analisis keuangan merupakan usaha mengidentifikasikan ciri-ciri keuangan berdasarkan laporan keuangan yang tersedia.

Analisis rasio keuangan pada APBD dilakukan dengan membandingkan hasil yang dicapai dari suatu periode dibandingkan dengan periode sebelumnya sehingga dapat diketahui kecenderungan yang terjadi. Adapun pihak-pihak yang berkepentingan dengan rasio keuangan pada APBD antara lain :

1. DPRD sebagai wakil rakyat dari masyarakat.
2. Pihak eksekutif sebagai landasan dalam menyusun APBD berikutnya.
3. Pemerintah pusat/provinsi sebagai bahan masukan dalam pembinaan pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah.

4. Masyarakat dan kreditur sebagai pihak yang akan turut memiliki saham Pemda, bersedia memberi pinjaman ataupun membeli obligasi.

2.1.12 Kegunaan Analisis Rasio Keuangan

Martono dan Agus (2012:240) mengungkapkan bahwa analisis rasio keuangan antara lain berguna dalam:

1. Pengambilan keputusan investasi.
2. Keputusan pemberian kredit.
3. Penilaian aliran kas.
4. Penilaian sumber-sumber ekonomi.
5. Melakukan klaim terhadap sumber-sumber dana.
6. Menganalisis perubahan-perubahan yang terjadi terhadap sumber-sumber dana.
7. Menganalisis penggunaan dana.

Berdasarkan sumber analisis, rasio keuangan dapat dibedakan menjadi :

1. Perbandingan internal, yaitu membandingkan rasio pada saat ini dengan rasio pada masa lalu dan masa yang akan datang dalam entitas yang sama.
2. Perbandingan eksternal, yaitu membandingkan rasio sebuah entitas dengan entitas-entitas sejenis atau dengan rata-rata entitas pada saat yang sama.

2.1.13 Jenis-Jenis Rasio Keuangan

Halim (2012:150) menyatakan, ada beberapa dikembangkan berdasarkan data keuangan yang bersumber dari APBD:

- a. Rasio Kemandirian Keuangan Daerah Rasio kemandirian menggambarkan ketergantungan daerah terhadap sumber dan ekstern. Semakin tinggi rasio

kemandirian daerah, tingkat ketergantungan terhadap bantuan pihak ekstern (terutama pemerintah pusat dan provinsi) semakin rendah, dan sebaliknya.

$$\text{Rasio Kemandirian} = \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Bantuan Pusat dan Pinjaman}}$$

(Halim, 2012:150)

Rasio ini juga menggambarkan tingkat partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah. Semakin tinggi rasio kemandirian, semakin tinggi partisipasi masyarakat dalam membayar pajak dan retribusi daerah serta menggambarkan tingkat kesejahteraan masyarakat yang semakin tinggi.

b. Rasio Efektifitas dan Efisiensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Rasio efektifitas menggambarkan kemampuan Pemda dalam merealisasikan PAD yang direncanakan dibandingkan target yang ditetapkan berdasarkan potensi riil daerah. Kemampuan daerah dalam menjalankan tugas dikategorikan efektif apabila rasio yang dicapai minimal sebesar 1 (satu) atau 100 persen. *Semakin tinggi rasio efektivitas menggambarkan kemampuan daerah yang semakin baik*

$$\text{Rasio Efektifitas} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan PAD}}{\text{Target Penerimaan PAD}}$$

(Halim, 2012:150)

Untuk memperoleh ukuran yang lebih baik, rasio efektifitas perlu dibandingkan dengan rasio efisiensi yang dicapai pemerintah. Rasio efisiensi menggambarkan perbandingan antara besarnya biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan dengan realisasi pendapatan yang diterima. Kinerja pemerintah daerah dikatakan efisien apabila rasio yang dicapai kurang dari 1(satu)

atau dibawah 100 persen. Semakin kecil rasio efisiensi menggambarkan kemampuan daerah yang semakin baik.

$$\text{Rasio Efisiensi} = \frac{\text{Biaya yang dikeluarkan untuk memungut PAD}}{\text{Realisasi Penerimaan PAD}}$$

(Halim, 2012:150)

c. Rasio Pertumbuhan, rasio pertumbuhan (growth ratio) mengukur seberapa besar kemampuan Pemda dalam mempertahankan dan meningkatkan keberhasilan yang telah dicapai dari periode ke periode berikutnya. Dengan mengetahui pertumbuhan masing-masing komponen sumber pendapatan dan pengeluaran, maka dapat dilakukan evaluasi terhadap potensi-potensi daerah yang perlu mendapat perhatian. Semakin tinggi persentase pertumbuhan setiap komponen pendapatan dan pengeluaran maka semakin besar kemampuan Pemda dalam mempertahankan dan meningkatkan keberhasilan yang dicapai dari setiap periode.

$$\text{Pendapatan Asli Daerah (PAD)} = \frac{\text{PAD}_{t1} - \text{PAD}_{t0}}{\text{PAD}_{t0}}$$

(Halim, 2012:150).

dimana: t_0 = tahun awal

t_1 = tahun akhir

2.2 Kerangka Pikir

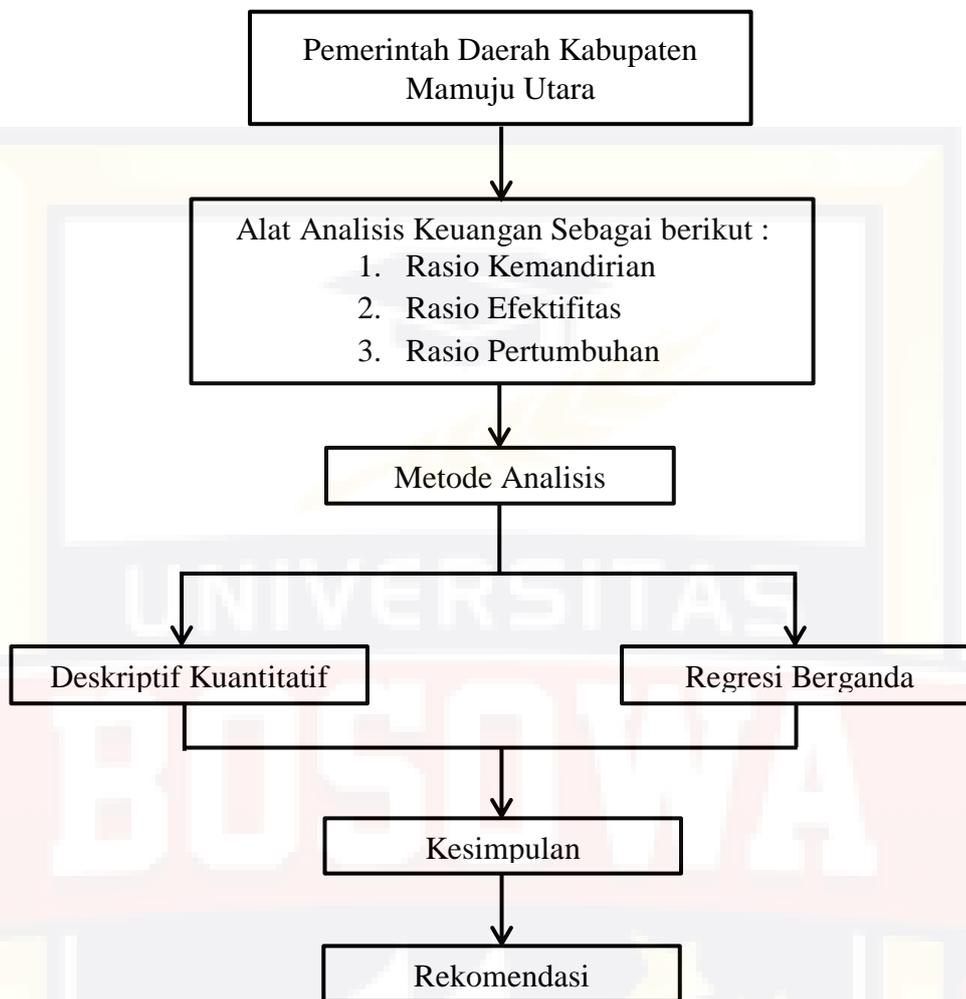
Penelitian ini didasari oleh Peraturan Menteri Dalam Negeri (PMDN) No.13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Dalam hal ini ada 2 (dua) kebijakan yang sangat berperan di dalamnya, yaitu kebijakan nasional dan kebijakan daerah. Kebijakan nasional tertuang dalam UU No. 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah yang telah direvisi dengan UU No. 33 Tahun 2004. Selain itu, juga tertuang dalam PP No. 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Sementara kebijakan daerah tertuang dalam UU No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah yang telah direvisi dengan UU No. 32 Tahun 2004.

Dilihat dari kebijakan-kebijakan di atas, maka dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode pengukuran kinerja keuangan daerah dengan alat analisis sebagai berikut:

1. Rasio kemandirian keuangan daerah
2. Rasio efektifitas
3. Rasio pertumbuhan

Alat analisis tersebut digunakan berdasarkan kajian teori dan penelitian terdahulu yang sangat memengaruhi metode pengukuran kinerja keuangan daerah. Rasio-rasio tersebut akan digunakan untuk melihat kinerja keuangan daerah Pemkab Mamuju Utara berpengaruh signifikan terhadap efisiensi penggunaan PAD.

Berdasarkan masalah yang ada, maka dapat dibuat suatu kerangka pikir secara sistematis seperti berikut:



Gambar 2.1 Kerangka Pikir

2.3 Hipotesis

Hipotesis dalam penelitian ini, antara lain:

Hipotesis 1 : Diduga bahwa efisiensi PAD Pemkab Mamuju Utara dalam delapan tahun terakhir (2009-2016) efisien.

Hipotesis 2 : Diduga bahwa kinerja keuangan daerah Pemkab Mamuju Utara berpengaruh signifikan terhadap efisiensi penggunaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam delapan tahun terakhir (2009-2016).



BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Lokasi Penelitian

Penelitian dilakukan di Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan, dan Aset Daerah (DPPKAD) Pemerintah Daerah Kabupaten Mamuju Utara yang berlokasi di Jalan Trans Sulawesi No. 723, Kabupaten Mamuju Utara.

3.2 Metode Pengumpulan Data

Metode penelitian yang digunakan dalam pengumpulan data Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah adalah:

1. Tinjauan Pustaka (*Library Research*)

Tinjauan Pustaka dilakukan dengan cara mengumpulkan data dan mempelajari literatur-literatur yang ada berupa buku-buku, karya ilmiah, jurnal atau artikel-artikel terkait, serta mengakses *website* dan situs-situs yang menyediakan informasi yang berkaitan dengan masalah penelitian.

2. Penelitian Lapangan (*Field Research*)

Penelitian lapangan adalah penelitian yang dilakukan langsung di instansi pemerintahan, dalam hal ini Pemda Kabupaten Mamuju Utara dengan melakukan wawancara (*interview*) dengan pihak yang berkompeten terhadap data yang diperlukan oleh penulis serta pengumpulan data yang dianggap relevan dengan masalah penelitian

3.3 Jenis dan Sumber Data

3.3.1 Jenis Data

1. Data kuantitatif, yaitu data yang berupa angka-angka yang termuat dalam Laporan Realisasi Anggaran Pemda Kabupaten Mamuju Utara tahun anggaran 2009-2016 serta data-data lain yang berhubungan dengan masalah penelitian.
2. Data kualitatif, yaitu data yang diperoleh dari hasil wawancara dengan pihak-pihak yang terkait, baik dari instansi Pemda Kabupaten Mamuju Utara maupun pihak lain yang dianggap kompeten dalam memberikan informasi yang dibutuhkan dalam penelitian ini.

3.3.2 Sumber Data

1. Data primer, yaitu data yang diperoleh secara langsung dari hasil penelitian (*field research*) pada instansi Pemda Kabupaten Mamuju Utara.
2. Data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari pihak lain atau sumber lain yang berkaitan dengan penelitian ini yang sudah diolah dan didapatkan melalui dokumen-dokumen yang telah tersedia.

3.4 Variabel Penelitian

Variabel dalam penelitian ini ada dua, yaitu variabel independen atau variabel bebas yang selanjutnya dinyatakan dengan simbol X dan variabel dependen atau terikat yang selanjutnya dinyatakan dengan simbol Y.

1. Variabel Bebas (X)

Variabel bebas merupakan variabel yang diduga memengaruhi variable terikat.

Variabel bebas yang digunakan dalam penelitian ini meliputi:

a. Rasio Kemandirian Keuangan Daerah (X_1)

Rasio kemandirian menggambarkan ketergantungan daerah terhadap sumber dana ekstern. Semakin tinggi rasio kemandirian daerah, tingkat ketergantungan terhadap bantuan pihak ekstern (terutama pemerintah pusat dan provinsi) semakin rendah, dan sebaliknya.

$$\text{Rasio Kemandirian} = \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Bantuan Pusat dan Pinjaman}}$$

Rasio ini juga menggambarkan tingkat partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah. Semakin tinggi rasio kemandirian, semakin tinggi partisipasi masyarakat dalam membayar pajak dan retribusi daerah serta menggambarkan tingkat kesejahteraan masyarakat yang semakin tinggi.

b. Rasio Efektifitas Pendapatan Asli Daerah (X_2)

Rasio efektifitas menggambarkan kemampuan Pemda dalam merealisasikan PAD yang direncanakan dibandingkan target yang ditetapkan berdasarkan potensi riil daerah. Kemampuan daerah dalam menjalankan tugas dikategorikan efektif apabila rasio yang dicapai minimal sebesar 1 (satu) atau 100 persen. Semakin tinggi rasio efektifitas menggambarkan kemampuan daerah yang semakin baik

$$\text{Rasio Efektifitas} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan PAD}}{\text{Target Penerimaan PAD}}$$

c. Rasio Pertumbuhan (X_3)\

Rasio pertumbuhan (*growth ratio*) mengukur seberapa besar kemampuan Pernda dalam mempertahankan dan meningkatkan keberhasilan yang telah dicapai dari periode ke periode berikutnya. Dengan mengetahui pertumbuhan masing-masing komponen sumber pendapatan dan pengeluaran, maka dapat dilakukan evaluasi terhadap potensi-potensi daerah yang perlu mendapat perhatian. Semakin tinggi presentase pertumbuhan setiap komponen pendapatan dan pengeluaran maka semakin besar kemampuan Pemda dalam mempertahankan dan meningkatkan keberhasilan yang dicapai dari setiap periode.

$$\text{Pendapatan Asli Daerah (PAD)} = \frac{\text{PAD}_{t1} - \text{PAD}_{t0}}{\text{PAD}_{t0}}$$

2. Variabel Terikat (Y)\

Variabel terikat merupakan variabel yang dipengaruhi oleh variabel bebas.

Variabel terikat dalam penelitian ini adalah rasio efisiensi PAD (Y).

Rasio efisiensi menggambarkan perbandingan antara besarnya biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan dengan realisasi pendapatan yang diterima. Kinerja pemerintah daerah dikatakan efisien apabila rasio yang dicapai kurang dari 1 (satu) atau dibawah 100 persen. Semakin kecil rasio efisiensi menggambarkan *kemampuan daerah yang semakin baik*

$$\text{Rasto Efisiensi} = \frac{\text{Biaya yang dikeluarkan untuk Memungut PAD}}{\text{realisasi Penerimaan PAD}}$$

Tabel 3. 1. Operasionalisasi Variabel Konsep

Variabel		Konsep	Indikator	Skala
Variabel Independent (X)	Rasio Kemandirian (X ₁)	Rasio Kemandirian Menunjukkan Kemampuan Pemda dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintahan	Rasio Kemandirian = PAD <hr/> Bantuan Pusat & peminjaman	Rasio
		Pembangunan, dan pelayanan Masyarakat.		
	Rasio Efektifitas (X ₂)	Rasio efektifitas menggambarkan kemampuan pemda dalam merealisasikan PAD yang direncanakan dibandingkan target yang ditetapkan berdasarkan potensi rill daerah.	Rasio efektifitas Realisasi Penerimaan PAD <hr/> Target Penerimaan PAD	Rasio
	Rasio Pertumbuhan (X ₃)	Rasio pertumbuhan mengukur seberapa besar kemampuan Pemda dalam mempertahankan dan meningkatkan keberhasilan yang telah dicapai dari	PADt1- PADt0 PAD= <hr/> PADt0	Rasio

		periode ke periode berikutnya.		
--	--	-----------------------------------	--	--

3.5 Metode Analisis

1. Analisis deskripsi kuantitatif

Metode ini menerapkan konsep perhitungan rasio keuangan, yaitu dengan menghitung rasio keuangan dari pos-pos dalam Realisasi Anggaran yang tertuang dalam Laporan Realisasi Anggaran untuk tahun anggaran 2009-2016. Metode ini dilakukan dengan memperhatikan indikator kinerja Pemda Kabupaten Mamuju Utara dalam mengelola keuangan daerahnya dengan menggunakan rasio-rasio.

2. Analisis Regresi Berganda

Regresi berganda berguna untuk meramalkan pengaruh dua variabel atau lebih terhadap satu variabel untuk membuktikan ada atau tidaknya hubungan antara dua buah variabel bebas (X) atau lebih dengan sebuah variabel terikat (Y). Analisis regresi berganda dalam penelitian ini digunakan untuk menganalisa kinerja kemandirian keuangan daerah Pemkab Mamuju Utara terhadap efisiensi PAD.

Formulasi persamaan regresi berganda adalah sebagai berikut:

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + b_3X_3 + e \text{ (Ghozali, 2012:13)}$$

di mana:

Y : rasio efisiensi PAD

a : bilangan konstanta

b_1 - b_3 : koefisien regresi

X_1 : rasio kemandirian keuangan daerah

X_2 : rasio efektifitas

X_3 : rasio belanja

e : variabel pengganggu

3. Uji T atau Uji Parsial

Uji T digunakan untuk menguji pengaruh variabel independen secara parsial terhadap variabel dependen, yaitu pengaruh dari masing-masing variabel independen yang terdiri atas rasio kemandirian keuangan daerah, rasio efektifitas, dan rasio belanja terhadap rasio efisiensi PAD yang merupakan variabel dependennya. Pengambilan keputusan uji hipotesis secara parsial didasarkan pada nilai probabilitas yang diperoleh dari hasil pengolahan data melalui program SPSS Statistik Parametrik (Ghozali, 2012:25) sebagai berikut:

- a. Jika probabilitas $< 0,05$ atau nilai man tad pada taraf signifikansi $0,05$, maka hipotesis diterima.
- b. Jika probabilitas $> 0,05$ atau thitung ttabel pada taraf signifikansi $0,05$, maka hipotesis ditolak.

Pada uji T, nilai probabilitas dapat dilihat dari hasil pengolahan program SPSS pada tabel *coefficients* kolom *sig* atau *significance*.

4. Uji F atau Uji Simultan

Uji F digunakan untuk menguji pengaruh variabel independen secara bersama-sama terhadap variabel independen dari suatu persamaan regresi dengan menggunakan hipotesis statistik. Sama halnya dengan uji hipotesis secara parsial, pengambilan keputusan secara simultan juga didasarkan pada nilai probabilitas yang diperoleh dari hasil pengolahan data SPSS Statistik Parametrik (Ghozali, 2012:26) sebagai berikut:

- a. Jika probabilitas $< 0,05$ atau nilai $F_{hitung} > F_{tabel}$ pada taraf signifikansi $0,05$, maka hipotesis diterima.
- b. Jika probabilitas $> 0,05$ atau $F_{hitung} < F_{tabel}$ pada taraf signifikansi $0,05$, maka hipotesis ditolak

Nilai probabilitas dari uji F dapat dilihat dari hasil pengolahan program SPSS pada tabel ANOVA kolom *sig* atau *significance*.

3.6 Defenisi Operasional

1. Laporan keuangan merupakan bagian dari proses pelaporan keuangan. Laporan keuangan yang lengkap biasanya meliputi neraca, laporan laba rugi. Laporan perubahan posisi keuangan (yang dapat disajikan dalam berbagai cara misalnya laporan arus kas, atau laporan arus dana), catatan dan laporan lain serta materi penjelasan yang merupakan bagian integral dari laporan keuangan.

2. Kinerja sebagai gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan atau program atau kebijaksanaan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi, dan visi organisasi yang tertuang dalam perumusan perencanaan strategis suatu organisasi. Secara umum, kinerja merupakan prestasi yang dapat dicapai oleh organisasi dalam periode tertentu.
3. Pengukuran kinerja merupakan manajemen pencapaian kinerja. Pengukuran kinerja secara berkelanjutan akan memberikan umpan balik (*feed back*) sehingga upaya perbaikan secara terus-menerus akan mencapai keberhasilan di masa datang.
4. Rasio keuangan adalah penulisan ulang data akuntansi ke dalam bentuk pertandingan dalam rangka mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan keuangan.
5. Pendapatan merupakan penghasilan yang timbul dari aktivitas perusahaan yang biasa dan dikenal dengan sebutan yang berbeda seperti penjualan, penjualan jasa (*fees*), bunga dividen, royalty, dan sewa. Pendapatan merupakan hal yang sangat penting, karena pendapatan itu yang menjadi objek atas kegiatan perusahaan.
6. Anggaran merupakan suatu rencana yang disusun secara sistematis dalam bentuk angka dan dinyatakan dalam unit moneter yang meliputi seluruh kegiatan perusahaan untuk jangka waktu (periode) tertentu di masa yang akan datang.

7. Belanja adalah semua pengeluaran kas daerah yang mengurangi ekuitas dana dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan, dan tidak akan diperoleh kembali pembayarannya oleh pemda.
8. Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya, yang dalam penganggaran pemda terutama dimaksudkan untuk menutupi deficit atau memanfaatkan surplus anggaran
9. Asset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai atau dimiliki oleh pemda sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dari mana manfaat ekonomi dan atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh.
10. Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemberdayaan daerah.
11. Ekuitas dana adalah kekayaan bersih pemda yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemda.
12. Rasio Kemandirian menggambarkan ketergantungan daerah terhadap sumber dana ekstern. Semakin tinggi rasio kemandirian daerah, tingkat ketergantungan terhadap bantuan pihak ekstern (terutama pemerintah pusat dan provinsi) semakin rendah dan sebaliknya.
13. Rasio efektifitas menggambarkan kemampuan pemda dalam merealisasikan PAD yang direncanakan dibandingkan target yang ditetapkan berdasarkan

Potensi riil daerah. Kemampuan daerah dalam menjalankan tugas dikategorikan apabila rasio yang dicapai minimal sebesar 1 (satu) atau 100 persen. Semakin tinggi rasio efektivitas menggambarkan kemampuan daerah yang semakin baik

14. Rasio pertumbuhan (*growth ratio*) mengukur seberapa besar kemampuan Pemda dalam mempertahankan dan meningkatkan keberhasilan yang dicapai dari periode ke periode berikutnya. Dengan mengetahui pertumbuhan masing masing komponen sumber pendapatan dan pengeluaran, maka dapat dilakukan evaluasi terhadap potensi-potensi daerah yang perlu mendapat perhatian.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum

4.1.1 Letak Geografis Kabupaten Mamuju Utara

Kabupaten Mamuju Utara merupakan salah satu Kabupaten dari 5 Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Barat, yang berada pada ujung paling utara Provinsi Sulawesi Barat.

Secara geografis Kabupaten Mamuju Utara terletak pada posisi $0^{\circ} 40' 10''$ - $1^{\circ} 50' 12''$ Lintang Selatan dan $119^{\circ} 25' 26''$ - $119^{\circ} 50' 20''$ Bujur Timur dari Jakarta ($0^{\circ} 0' 0''$ Jakarta - $160^{\circ} 48' 28''$ Bujur Timur Green Wich) dengan luas wilayah sebesar 3.043,75 KM.

Batas wilayah Kabupaten Mamuju Utara secara administratif dan diuraikan sebagai berikut :

- a. Sebelah Utara : Berbatasan Dengan Kab. Doggala, Prov. Sul-Teng
- b. Sebelah Selatan : Berbatasan Dengan Kab. Mamuju, Prov. Sul-Bar
- c. Sebelah Timur : Berbatasan Dengan Kab. Mamuju, Prov. Sul-Sel
- d. Sebelah Barat : Berbatasan Dengan Selat Makassar

4.1.2 Letak Administratif

Kabupaten Mamuju Utara secara administrasi pemerintahan terdiri atas 12 kecamatan dan 59 Desa dan 4 Kelurahan. Kecamatan Dapurang merupakan kecamatan terluas dengan luas 930,06 km atau 30,56% persen dan wilayah Kabupaten Mamuju Utara, sedangkan kecamatan dengan kecamatan dengan luas

terkecil adalah Kecamatan Sarjo dengan luas 36,49 km² atau 1.20% persen dari luas wilayah Kabupaten Mamuju Utara

Berdasarkan letak geografis kecamatan yang paling jauh kabupaten adalah Kecamatan Duripoku, dimana ibukota Kecamatan Duripoku (Tammarunang), mempunyai jarak sekitar 101 Km dari ibukota kabupaten (Pasangkayu). Sedangkan kecamatan yang terdekat dari ibukota kabupaten adalah Kecamatan Pedongga yang berjarak sekitar 15 Km dari ibukota kabupaten.

4.1.3 Tugas dan Fungsi Unit Kerja Dinas Pendapatan, Pengelolaan, Keuangan dan Aset Daerah (DPPKD) Kabupaten Mamuju Utara

Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) adalah salah satu perangkat yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada bupati melalui sekretaris daerah kabupaten. Adapun tugas pokok, fungsi dan tata kerja DPPKAD berdasarkan Perda Nomor 26 tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Pemerintah Kabupaten Mamuju Utara. Untuk lebih jelasnya. Struktur Organisasi DPPKAD Kabupaten Mamuju Utara dapat dilihat pada lampiran.

Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Kabupaten Mamuju Utara terdiri atas :

1. Kepala Dinas

Kepala Dinas mempunyai fungsi;

- a. Perumusan kebijakan teknis dinas.
- b. Penyusunan rencana strategik dinas.

- c. Penyelenggaraan pelayanan urusan pemerintahan dan pelayanan umbidang pengelolaan pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset.
- d. Pembinaan, pengkoordinasian, pengendalian, pengawasan program dan kegiatan dinas.
- e. Penyelenggaraan evaluasi program dan kegiatan dinas.
- f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Rincian tugas kepala dinas antara lain :

- a. Merumuskan, mengarahkan dan menyelenggarakan rencana strategik program kerja dinas sesuai dengan visi dan misi daerah.
- b. Mengkoordinasikan perumusan dan penyusunan program kerja dinas sesuai dengan bidang tugasnya.
- c. Mengkoordinasikan penyusun dan pedoman pelaksanaan kebijakan penyusunan pengelolaan keuangan daerah, mengkoordinasikan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD). rancangan perubahan APBD dan sisa perhitungan APBD serta melakukan pengendalian dan pengawasan terhadap pelaksanaan APBD.
- d. Mengarahkan, merumuskan program kerja dan menetapkan kebijakan operasional di bidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah

2. Sekretaris

Sekretariat mempunyai fungsi:

- a. Perumusan kebijakan teknis administrasi kepegawaian, administrasi keuangan, perencanaan pelaporan dan urusan rumah tangga.

- b. Penyelenggaraan administrasi umum.
- c. Pembinaan, pengkoordinasian, pengendalian pengawasan program dan kegiatan sub bagian.
- d. Penyelenggaraan monitoring dan evaluasi program kegiatan.
- e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Rincian tugas sekretariat antara lain:

- a. Merencanakan, mengkoordinasikan, menggerakkan dan mengendalikan serta menetapkan kebijakan di bidang umum, kepegawaian, keuangan dan perlengkapan.
- b. Merencanakan kegiatan tahunan sebagai pedoman pelaksanaan tugas.
- c. Mengelola dan mengkoordinasikan pelaksanaan pelayanan teknis dan administratif kepada seluruh satuan organisasi dalam lingkup dinas.
- d. Mengelola dan mengkoordinasikan pelaksanaan urusan umum dan kepegawaian.
- e. Mengelola dan mengkoordinasikan pelaksanaan urusan perencanaan dan pelaporan.

Sekretariat terdiri dari:

- 1. Sub bagian umum kepegawaian, mempunyai tugas antara lain:
 - a. Menyusun rencana pelaksanaan program dan kegiatan di bidang umum dan kepegawaian sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas.
 - b. Mengelola dan melaksanakan urusan rumah tangga urusan rumah tangga dan surat menyurat.

- c. Mengelola dan melaksanakan urusan kearsipan dan perpustakaan.
- d. Mengelola dan melaksanakan urusan keprotokoleraan dan penjara dinas.

2. Sub bagian perencanaan dan pelaporan, mempunyai tugas antara lain :

- a. Menyusun rencana dan jadwal kegiatan operasional tahunan dinas sebagai pedoman pelaksanaan tugas.
- b. Menghimpun dan mempersiapkan bahan penyusun rencana kerja dinas.
- c. Menghimpun dan mempersiapkan bahan penyusunan laporan.
- d. Mengkoordinasikan penyusunan rencana program dan kegiatan dinas.

3. Sub bagian keuangan, mempunyai tugas antara lain :

- a. Membuat rencana operasional program kerja sub bagian.
- b. Mempersiapkan bahan-bahan dan penyusunan rencana kebutuhan anggaran dilingkungan dinas' sebagai pedoman pelaksanaan tugas.
- c. Membuat daftar usulan kegiatan
- d. Membuat daftar gaji dan melaksanakan penggajian.

3. Bidang Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Bidang PAD mempunyai fungsi yaitu :

- a. Penyusunan kebijakan teknis bidang
- b. Penyelenggaraan program dan kegiatan bidang.
- c. Pembinaan, pengkoordinasian, pengendalian, pengawasan, pengendalian, pengawasan program dan kegiatan kepala seksi dalam lingkup bidang.
- d. Penyelenggaraan monitoring dan evaluasi program kegiatan

- e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas fungsinya.

Bidang PAD mempunyai tugas yaitu :

- a. Merencanakan program dan kegiatan sesuai tugas dan fungsinya sebagai pedoman pelaksanaan tugas.
- b. Menyelenggarakan operasionalisasi rencana kerja sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- c. Merumuskan kebijakan teknis pelaksanaan dan pengkoordinasian potensi PAD.
- d. Memberikan petunjuk administratif dan operasional pelaksanaan tugas kepada Kepala Seksi dan Kepala UPTD sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- e. Menyelenggarakan pembinaan dan pengawasan, evaluasi pajak dan retribusi serta punguta lainnya yang sah.

Bidang PAD terdiri dari :\

- a. Seksi pajak daerah, bertugas:
 - 1. Menyusun rencana kerja sesuai tugas dan sebagai pedoman pelaksanaan tugas.
 - 2. Melaksanakan rencana penerimaan pendapatan daerah yang bersumber dari pajak daerah.
 - 3. Melaksanakan pengkajian terhadap peraturan perundang di bidang pajak daerah serta data potensi pajak daerah.

4. Membuat kebijakan bisnis pemungutan pajak daerah meliputi pendataan, penetapan penerimaan, penyetoran dan penagihan.

b. Seksi retribusi pajak daerah, bertugas:

1. Menyusun rencana kerja sesuai tugas dan fungsinya sebagai pedoman pelaksanaan tugas.
2. Melaksanakan pengkajian terhadap peraturan perundang-undangan di bidang retribusi daerah serta data potensi retribusi daerah.
3. Melakukan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas.
4. Melaksanakan monitoring dan evaluasi pr-ogram dan kegiatan serta membuat laporan hasil pelaksanaan tugas.

c. Seksi lain-lain PAD yang sah, bertugas:

1. Menyusun rencana kerja sesuai tugas dan fungsinya sesuai dengan pedoman pelaksanaan tugas.
2. Melaksanakan pengkajian terhadap peraturan perundang-undangan di bidang lain-lain PAD yang sah serta data potensi lain-lain PAD yang sah.
3. Melakukan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas.
4. Menilai prestasi kerja staf dalam rangka pembinaan dan pengembangan karier.

4. Bidang Anggaran

Bidang Anggaran mempunyai fungsi antara lain :

- a. Penyusun kebijakan teknis bidang.
- b. Penyelenggaraan program dan kegiatan bidang,
- c. Pembinaan, pengkoordinasian, pengendalian, pengawasan program dan kegiatan kepala seksi dalam lingkup bidang.
- d. Penyelenggaraan monitoring dan evaluasi program kegiatan.
- e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bidang anggaran mempunyai tugas antara lain:

- a. Merencanakan program dan kegiatan sesuai tugas dan fungsinya sebagai pedoman pelaksanaan tugas.
- b. Menyelenggarakan operasionalisasi rencana kerja sesuai tugas dan fungsinya. Kebijakan.
- c. Merumuskan teknis pelaksanaan dan pengkoordinasian pengelolaan anggaran.
- d. Melaksanakan pengkajian kebijakan pengaplikasian anggaran daerah dan penyusunan APBD.

Bidang anggaran terdiri dari :

- a. Seksi penyusunan APBD

Seksi penyusunan APBD mempunyai tugas antara lain:

1. Menyusun rencana kerja sesuai tugas dan fungsinya seba pelaksanaan tugas.
2. Melaksanakan pengkajian kebijakan pegalokasian daerah.
3. Menyiapkan bahan perumusan pedoman penyusunan APBD.
4. Melaksanakan rekapitulasi dokumen anggaran dan perubahan anggaran

b. Seksi perbendaharaan

Seksi perbendaharaan mempunyai tugas antara lain :

1. Menyusun rencana sesuai tugas dan fungsinya sebagai pedoman pelaksanaan tugas.
2. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan pelaksanaan tugas perbendaharaan.
3. Melakukan pembinaan penatausahaan keuangan dan perbendaharaan.
4. Melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas.
5. Bidang akuntansi

Bidang akuntansi mempunyai fungsi antara lain :

- a. Penyusunan teknis bidang
- b. Penyelenggaraan program dan kegiatan bidang.
- c. Pembinaan, pengoordinasian, pengawasan program dan kegiatan kepala seksi dalam lingkup bidang.
- d. Penyelenggaraan monitoring dan evaluasi program kegiatan.
- e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bidang akuntansi mempunyai tugas antara lain;

- a. Merencanakan kegiatan dan program sesuai dengan tugasnya sebagai pedoman pelaksanaan tugas.
- b. Menyelenggarakan operasionalisasi rencana kerja sesuai tugas dan fungsinya.

- c. Melaksanakan pengendalian dan pengawasan bidang keuangan sesuai dengan target yang ditentukan.
- d. Melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas.

Bidang akuntansi terdiri dari;

- a. Seksi akuntansi penerimaan dan pengeluaran kas

Seksi akuntansi penerimaan dan pengeluaran kas mempunyai tugas antara lain;

1. Menyusun rencana kerja sesuai tugas dan fungsinya sebagai pedoman/pelaksanaan tugas.
2. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan penyelenggaraan penerimaan dan pengeluaran kas.
3. Melakukan sistem dan prosedur akuntansi yang berkenaan dengan penerimaan dan pengeluaran kas daerah.
4. Melaksanakan pencatatan dan penggolongan berdasarkan rincian objek penerimaan dan pengeluaran kas daerah.

- b. Seksi akuntansi aset

Seksi akuntansi aset mempunyai tugas antara lain

1. Menyusun rencana kerja sesuai tugas dan fungsinya sebagai pedoman pelaksanaan tugas.
2. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan penyelenggaran akuntansi aset.

3. Melaksanakan pencatatan transaksi dan/atau kejadian keuangan daerah yang berkenaan dengan aset.

4. Membuat laporan penerimaan dan pengeluaran kas yang berkenaan dengan aset secara periodik (semesteran dan laporan akhir bulanan).

c. Seksi penyusunan laporan keuangan

Seksi penyusunan laporan keuangan mempunyai tugas antara lain :

1. Menyusun rencana kerja sesuai tugas dan fungsinya sebagai pedoman pelaksanaan tugas.

2. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan penyelenggaraan laporan keuangan.

3. Mengumpulkan data, menganalisis dan menyusun laporan semesteran dan prognosis APBD tahun anggaran yang berkenaan.

4. Melaksanakan koordinasi penurunan laporan pertanggung jawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran yang berkenaan.

6. Bidang aset

Bidang aset mempunyai fungsi antara lain:

a. Penyusunan teknis bidang

b. Penyelenggaraan program dan kegiatan bidang.

c. Pembinaan, pengoordinasian, pengawasan program dan kegiatan kepala seksi dalam lingkup bidang.

d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bidang aset mempunyai tugas antara lain:

- a. Merencanakan program dan kegiatan sesuai dengan tugasnya sebagai pedoman pelaksanaan tugas.
- b. Menyelenggarakan operasionalisasi rencana kerja sesuai tugas dan fungsinya.
- c. Merumuskan kebijakan teknis pelaksanaan dan pengkoordinasian pengelolaan aset.
- d. Mengordinir inventarisasi aset daerah, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak.
- e. Melakukan monitoring dan evaluasi serta melaporkan hasil pelaksanaan tugas.

Bidang aset terdiri dari:

- a. Seksi Bidang Perencanaan Kebutuhan memiliki tugas antara lain :
 1. Menyusun rencana kerja sesuai tugas dan fungsinya.
 2. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan penyelenggaraan perencanaan kebutuhan.
 3. Menyediakan bahan perencanaan dan pengadaan aset daerah.
 4. Membuat daftar rencana dan analisis kebutuhan aset daerah.
- b. Seksi Distribusi

Seksi Distribusi memiliki tugas antara lain :

1. Menyusun rencana kerja sesuai tugas dan fungsinya.
2. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan penyelenggaraan distribusi aset.

3. Melaksanakan pengawasan distribusi aset.

4. Membuat data dasar neraca aset daerah.

5. Seksi Inventarisasi dan Penghapusan.

7. Bidang Dana Perimbangan

Bidang dana perimbangan memiliki fungsi antara lain :

- a. Penyusunan kebijakan teknis bidang
- b. Penyelenggaraan program dan kegiatan bidang
- c. Penyelenggaraan monitoring dan evaluasi program kegiatan
- d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bidang dana perimbangan memiliki tugas antara lain :

- a. Merencanakan program dan kegiatan sesuai dengan tugasnya sebagai pedoman pelaksanaan tugas
- b. Menyelenggarakan operasionalisasi rencana kerja sesuai tugas dan fungsinya
- c. Merumuskan kebijakan teknis pelaksanaan dan pengkoordinasian penyelenggaraan perimbangan
- d. Merumuskan dan mengendalikan perimbangan keuangan dalam pengelolaan pendapatan daerah dan penggunaan anggaran pada perangkat daerah.

Bidang dana perimbangan terdiri dari :

- a. Seksi dana bagi hasil

Seksi dana bagi hasil memiliki tugas antara lain :

1. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan penyelenggaraan dana bagi hasil.
 2. Memfasilitasi penyusunan bahan rumusan dan perhitungan dana bagi hasil.
 3. Menyiapkan bahan dalam rangka penetapan dana bagi hasil.
 4. Melaksanakan bimbingan teknis kebijakan dana bagi hasil
- b. Seksi dana alokasi umum

Seksi dana alokasi umum memiliki tugas antara lain :

1. Mengumpulkan data penerimaan dari dana alokasi umum.
 2. Menyiapkan bahan ketepatan dan dokumen transfer dana alokasi umum
 3. Menyiapkan bahan dalam rangka pelaksanaan penetapan dana alokasi umum
 4. Melaksanakan bimbingan teknis kebijakan dana alokasi umum
- c. Seksi lain-lain pendapatan yang sah

Seksi lain-lain pendapatan yang sah memiliki tugas antara lain :

1. Menyusun rencana kerja sesuai dengan tugas dan fungsinya sebagai pedoman pelaksanaan tugas.
2. Membuat petunjuk teknis di bidang penerimaan dana perimbangan dana dan sumber-sumber lain yang sah.
3. Melakukan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas

Rumusan Visi dan Misi Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Mamuju Utara adalah sebagai berikut:

“Tercapainya Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Mamuju Utara yang terukur dan rasional”

1. Meningkatkan pendapatan serta efektifitas pengelolaan keuangan dan aset daerah.
2. Meningkatkan sarana dan prasarana yang memenuhi standar pelayanan.
3. Meningkatkan kualitas sumber daya aparatur.
4. Meningkatkan kesadaran masyarakat.

4.2 Hasil Analisis

4.2.1 Gambaran Umum Variabel Penelitian

a. Rasio Kemandirian Keuangan Daerah

Kemandirian keuangan daerah menunjukkan kemampuan Pemda dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan masyarakat. Rasio kemandirian juga menggambarkan ketergantungan daerah terhadap sumber dana ekstern, terutama pemerintah pusat dan provinsi. *Semakin tinggi rasio kemandirian daerah, tingkat ketergantungan terhadap bantuan pihak ekstern (terutama pemerintah pusat dan provinsi) semakin rendah, dan sebaliknya.*

Rasio Kemandirian Pemerintah Kabupaten Mamuju Utara dapat dihitung sebagai berikut :

$$\text{Rasio Kemandirian} = \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Bantuan Pusat dan Pinjaman}}$$

Hasil perhitungan rasio kemandirian keuangan daerah dapat dilihat pada tabel berikut (berdasarkan lampiran) :

Tabel 5.1 Perhitungan Rasio Kemandirian Kabupaten Mamuju Utara
Tahun Anggaran 2009-2016

Tahun	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Pendapatan Transfer Dana Perimbangan	Lain-lain Pendapatan Yang Sah	Rasio Kemandirian
2009	8.914.222.635,39	169.168.080.079,14	12.188.130.364,00	4,92%
2010	6.084.124.834,80	179.180.422.067,79	10.164.422.657,00	3,21%
2011	6.876.125.679,32	201.193.276.220,00	10.146.928.131,00	3,25%
2012	11.266.106.312,36	325.463.397.877,00	5.389.408.621,00	3,41%
2013	16.280.918.440,79	364.303.221.066,00	8.358.266.957,00	4,37%
2014	17.460.780.983,52	392.132.343.171,00	38.657.223.368,00	4,05%
2015	15.879.402.285,47	414.327.271.541,00	30.961.364.434,00	3,57%
2016	16.531.437.645,61	397.522.593.650,00	90.618.295.232,14	3,39%

Sumber: Data Sekunder yang Diolah (Lampiran)

Pada tabel 5.1 di atas, diketahui bahwa rasio kemandirian keuangan daerah Pemkab Mamuju Utara dalam delapan tahun terakhir (2009-2016) hanya mengalami tiga kali kenaikan, yaitu pada tahun 2010-2011 sebesar 0,04% (3,25%-3,21%). 2011-2012 sebesar 0,16% (3,14%-3,25%) dan 2012-2013 sebesar 0,83% (4,24%-3,41%). Selebihnya mengalami penurunan yang cukup drastis, yaitu 2009-2010 sebesar 1,71% (4,92-3,21%) sebesar 0,19% (4,37%-4,05%), tahun

2014-2015 sebesar 0,48% (4,05%-3,75%) hingga tahun 2015-2016 sebesar 0,18% (3,57%-3,39%).

b. Rasio Efektifitas Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Rasio efektifitas menggambarkan kemampuan Pemda dalam merealisasikan PAD yang direncanakan dibandingkan target yang ditetapkan berdasarkan potensi riil daerah. Kemampuan daerah dalam menjalankan tugas dikategorikan efektif apabila rasio yang dicapai minimal sebesar 1 (satu) atau 100 persen. *Semakin tinggi rasio efektifitas menggambarkan kemampuan daerah yang semakin baik.*

Rasio efektifitas Pemerintah Kabupaten Mamuju Utara dapat dihitung sebagai berikut:

$$\text{Rasio Efektifitas} = \frac{\text{Realisasi penerimaan PAD}}{\text{Target penerimaan PAD}}$$

Hasil perhitungan rasio efektifitas PAD dapat dilihat pada tabel berikut (berdasarkan lampiran):

Tabel 5.2 Perhitungan Rasio Efektifitas Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Tahun Anggaran 2009-2016

Tahun	Target Penerimaan PAD	Realisasi Penerimaan PAD	Rasio Efektifitas
2009	10.565.242.572,00	8.914.222.635,39	84,37%
2010	8.146.203.368,00	6.084.124.834,80	74,69%
2011	6.709.499.464,00	6.876.125.679,32	102,48%
2012	7.764.902.747,00	11.266.106.312,36	145,10%
2013	14.810.965.660,00	16.280.918.440,79	109,92%

2014	13.419.093.406,00	17.460.780.983,52	130,12%
2015	18.083.539.916,00	15.879.402.285,47	87,81%
2016	20.423.100.023,06	16.531.437.645,61	80,94%

Sumber: Data Sekunder yang Diolah (Lampiran)

Pada tabel 5.2 di atas ,dapat dilihat bahwa rasio efektifitas Pemkab Mamuju Utara dalam sembilan tahun terakhir (2009-2016) mengalami kenaikan sebanyak tiga kali, yaitu pada tahun 2010-2011 sebesar 27,79% (102,48%-74,69%), 2011-2012 sebesar 42,62% (145,10%-102,48%), dan 2013-2014 sebesar 23,3% (130.12%-109,92%). Selebihnya mengalami penurunan pada tahun 2009-2010 sebesar 9,68 % (84,37%-74,69%), 2012-2013 sebesar 38.28% (145,10%-109,92%, tahun 2014-2-15 sebesar 42,31% (130,12%-87,81% dan tahun 2016 sebesar 6,87% (87,81%-80,94%).

c. Rasio Pertumbuhan

Rasio pertumbuhan (*growth rasio*) mengukur seberapa besar kemampuan Pemda dalam mempertahankan dan meningkatkan keberhasilan yang telah dicapai dari periode ke periode berikutnya. Dengan mengetahui pertumbuhan PAD, maka dapat dilakukan evaluasi terhadap potensi-potensi daerah yang perlu mendapat perhatian. Semakin tinggi persentase pertumbuhan pendapatan asli daerah, maka semakin besar kemampuan Pemda dalam mempertahankan dan meningkatkan keberhasilan yang dicapai dari setiap periode.

Rasio pertumbuhan Pemerintah Kabupaten Mamuju Utara dapat dihitung sebagai berikut:

$$\text{Pendapatan Asli Daerah (PAD)} = \frac{\text{PADt1}-\text{PADt0}}{\text{PADt0}}$$

Hasil perhitungan rasio pertumbuhan dapat dilihat pada tabel berikut (berdasarkan lampiran):

Tabel 5.3 Perhitungan Rasio Pertumbuhan APBD Kabupaten Mamuju Utara
Tahun Anggaran 2009-2016

Tahun	PAD_{t0}	PAD_{t1}	Rasio Pertumbuhan
2009-2010	8.914.222.635,39	6.084.124.834,80	-31,75%
2010-2011	6.084.124.834,80	6.876.125.679,32	13,02%
2011-2012	6.876.125.679,32	11.266.106.312,36	63,84%
2012-2013	11.266.106.321,36	16.280.918.440,79	44,51%
2013-2014	16.280.918.440,79	17.460.780.983,53	7,25%
2014-2015	17.460.780.983,52	15.879.402.285,47	-9,06%
2015-2016	15.879.402.285,47	16.531.437.645,61	4,11%

Sumber: Data Sekunder yang Diolah (Lampiran)

Pada tabel 5.3 di atas, ada dua periode dalam delapan tahun terakhir (2009-2016) di mana rasio sebesar -31,75% dan 2014-2015 sebesar -9,06%. Adapun rasio pertumbuhan yang mengalami kenaikan, yaitu pada tahun 2009-2010 sebesar -31,75% naik menjadi 13,02 tahun 2010-2011, kemudian naik menjadi 63,84% pada tahun 2011-2012. Begitupula pada tahun 2014-2015 sebesar -9,06% naik menjadi 4,11% tahun 2015-2016. Sebaliknya mengalami penurunan, yaitu pada tahun 2011-2012 turun dari 63,84 menjadi 44,51% pada tahun 2012-2013 kemudian turun menjadi 7,25% tahun 2013-2014 dan turun menjadi -9,06% tahun 2014-2015.

d. Rasio Efisiensi Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Untuk memperoleh ukuran yang lebih baik, rasio efektifitas perlu diperbandingkan dengan rasio efisiensi yang dicapai pemerintah. Rasio efisiensi menggambarkan perbandingan dengan realisasi pendapatan yang diterima. Kinerja Pemda dikatakan efisien apabila rasio yang dicapai kurang dari 1 (satu) atau dibawah 100 persen. Semakin kecil rasio efisiensi menggambarkan kemampuan daerah yang semakin baik.

Rasio efisiensi Pemerintah Kabupaten Mamuju Utara dapat dihitung sebagai berikut:

$$\text{Rasio Efisiensi} = \frac{\text{Biaya yang dikeluarkan untuk Memungut PAD}}{\text{Realisasi Penerimaan PAD}}$$

Hasil perhitungan rasio efisiensi PAD dapat dilihat pada tabel berikut (berdasarkan lampiran):

Tabel 5.4 Perhitungan Rasio Efisiensi Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Tahun Anggaran 2009-2016

Tahun	Realisasi Penerimaan PAD	Biaya Pemungutan PAD	Rasio Efisiensi
2009	8.914.222.635,39	6.341.105.060,00	71,13%
2010	6.084.124.834,80	72.943.008,00	1,20%
2011	6.876.125.679,32	89.812.848.,00	1,31%
2012	11.266.106.312,36	1.335.081.366,00	11,85%
2013	16.280.918.440,79	10.723.999.999,00	65,87%
2014	17.460.780.983,52	11.490.926.673,00	65,81%

2015	15.879.402.285,47	241.776.290,00	1,52%
2016	16.531.437.645,61	247.021.054,00	1,49%

Sumber: Data Sekunder yang Diolah (Lampiran)

Pada tabel 5.4 di atas, dapat dilihat bahwa rasio efisiensi PAD Pemkab Mamuju Utara dalam delapan tahun terakhir (2009-2016) mengalami kenaikan sebanyak tiga kali, yaitu pada tahun 2010-2011 sebesar 0,11% (1,31%-1,20%), 2011-2012 sebesar 10,54% (11,85%-1,31%), 2012-2013 sebesar 54,02% (65,87%-11,85%). Selebihnya mengalami penurunan, yaitu pada tahun 2009-2010 sebesar 69,93% (71,13%-1,20%), 2013-2014 sebesar 0,06% (65,87%-65,81%), 2014-2015 sebesar 64,29% (65,81%-1,52%), 2015-2016 sebesar 0,03% (1,52%-1,49%).

4.2.2 Uji Hipotesis

Analisis kinerja keuangan daerah Pemkab Mamuju keuangan daerah Pemkab Mamuju Utara terhadap efisiensi PAD atau pengaruh rasio kemandirian, rasio efektifitas, dan pertumbuhan terhadap efisiensi PAD dapat dilihat dari analisis regresi berganda dengan menggunakan SPSS (Statistical Product Service Solution) seperti pada lampiran berikut:

Tabel 5.5. Hasil Analisis Regresi

Model	Coefficientsa		Standardized Coefficients	T	Sig.
	Unstandardized Coefficients				
	B	Std. Error	Beta		

1	(Constant)	-22.627	41.699		-5.315	.006
	Rasio Kemandirian	51.147	7.279	.943	7.026	.002
	Rasio Efektifitas	.583	.295	.438	1.972	.120
	Rasio Pertumbuhan	-.272	.249	-.245	-1093	.336

a. Dependent Variable: Rasio Efisiensi

Sumber: Data Sekunder yang Diolah (Lampiran)

Berdasarkan hasil analisis regresi yang tertera pada tabel 3.5 di atas, diperoleh persamaan regresi yang distandarkan, yaitu:

$$\text{Efisiensi} = 0,943\text{RK} + 0,438\text{RE} - 0,245\text{RP},$$

di mana:

RK = Rasio Kemandirian

RE = Rasio Efektifitas

RP = Rasio Pertumbuhan

Model regresi tersebut menunjukkan bahwa setiap terjadi kenaikan rasio kemandirian satu satuan akan diikuti kenaikan rasio efisiensi sebesar 0,943.

a. Uji atau Uji Parsial

1. Pengaruh Rasio Kemandirian terhadap Efisiensi PAD

Berdasarkan hasil pengujian secara parsial, pengaruh terhadap efisiensi PAD dengan menggunakan program SPSS t_{hitung} sebesar 020 dan tabel sebesar 2,78 dengan nilai signifikansi 0,002. Karena $t_{hitung} > t_{tabel}$ dan nilai probabilitasnya $< 0,05$, maka disimpulkan bahwa hipotesis diterima. Hal ini menunjukkan bahwa rasio kemandirian berpengaruh signifikan terhadap efisiensi PAD.

2. Pengaruh Rasio Efektifitas terhadap Efisiensi PAD

Berdasarkan hasil pengujian secara parsial, pengaruh rasio efektifitas terhadap efisiensi PAD dengan menggunakan program SPSS diperoleh thitung sebesar 1,972 dan ttabel sebesar 2,78 dengan nilai signifikansi 0,120. Karena thitung < ttabel dan nilai probabilitasnya > 0,05, maka hipotesis ditolak. Hal ini menunjukkan bahwa rasio efektifitas tidak berpengaruh signifikan terhadap efisiensi PAD.

3. Pengaruh Rasio Pertumbuhan terhadap Efisiensi PAD

Berdasarkan hasil pengujian secara parsial, pengaruh rasio pertumbuhan terhadap efisiensi PAD dengan menggunakan program SPSS diperoleh thitan sebesar -1,093 dan tabel sebesar 2,78 dengan nilai signifikansi 0,336. Karena thitung < ttabel dan nilai probabilitasnya > 0,05, maka hipotesis ditolak. Hal ini menunjukkan bahwa rasio pertumbuhan tidak berpengaruh signifikan terhadap efisiensi PAD.

b. Uji atau Uji Simultan

Pengujian hipotesis yang menyatakan ada pengaruh secara simultan rasio kemandirian, rasio efektifitas, rasio pertumbuhan terhadap efisiensi PAD dilihat dari hasil uji F yang tertera pada tabel 5.6 berikut:

Tabel 5.6. Hasil Uji F (Uji Simultan)

ANOVA b

Model		Sum Of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	7273.299	3	2424.433	17.820	.009a
	Residual	544.196	4	136.049		
	Total	7817.495	7			

a. Predictions: (Constant), pertumbuhan, Rasio Kemandirian, Rasio Efektifitas

b. Dependent Variable: Rasio Efisiensi

Sumber: Data Sekunder yang Diolah (Lampiran)

Berdasarkan hasil uji F (Uji Simultan) di atas, diperoleh Fhitung sebesar 17,820 dan Featet sebesar 6,59 dengan nilai signifikansi 0,09. Karena Fhitung > Featet dan nilai probabilitasnya < 0,05, maka hipotesis diterima. Hal ini menunjukkan bahwa kinerja keuangan daerah dengan rasio kemandirian, rasio efektifitas, rasio pertumbuhan berpengaruh secara simultan terhadap efisiensi PAD.

4.3 Pembahasan

Hasil analisis data di atas menunjukkan bahwa secara parsial rasio kemandirian berpengaruh signifikan terhadap efisiensi PAD, terbukti dengan nilai probabilitas 0,002 < 0,05. Model regresi yang terbentuk dari hasil analisis regresi menunjukkan bahwa setiap kenaikan rasio kemandirian satu satuan akan diikuti kenaikan efisiensi PAD sebesar 0,943. Sementara itu, rasio kemandirian Pemkab Mamuju Utara cukup dinamis dengan adanya kenaikan dan penurunan delapan tahun terakhir (2009-2016). Meskipun demikian, Kabupaten Mamuju Utara dapat terus meningkatkan kemandirian keuangan daerahnya dengan mengoptimalkan pemanfaatan 9 (sembilan) sektor usaha yang dimilikinya, yaitu: pertanian, pertambangan dan penggalan; industri penggalan, industri pengolahan, listrik, gas dan air bersih; konstruksi, perdagangan; hotel dan restoran; angkutan dan komunikasi keuangan; persewaan dan jasa perusahaan, serta jasa-jasa.

Berdasarkan hasil analisis regresi secara parsial, rasio efektifitas tidak berpengaruh signifikan terhadap efisiensi PAD terbukti dari nilai probabilitas

sebesar $0,120 > 0,05$. Hal ini berarti bahwa apa yang ditargetkan belum tentu sama dengan realisasi yang ada. Target bisa lebih besar dari realisasi, dan sebaliknya target bisa lebih kecil dari realisasi.

Hasil analisis regresi secara parsial menunjukkan bahwa rasiopertumbuhan tidak berpengaruh signifikan terhadap efisiensi PAD, terbukti dari nilai probabilitas sebesar $0,336 > 0,05$. Hal ini menunjukkan bahwa rasio pertumbuhan tidak berdampak positif terhadap efisiensi PAD.

Sedangkan secara simultan, dapat diketahui bahwa variabel independen yang digunakan, yaitu rasio kemandirian (X_1), rasio efektifitas (X_2), dan rasio pertumbuhan (X_3) berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen, yaitu efisiensi PAD (Y). Hal ini dapat dilihat dari nilai F_{hitung} sebesar 17,820 dengan tingkat signifikansi sebesar 0,009 yang lebih kecil dari tingkat signifikansi yang digunakan, yaitu 0,05. Nilai R^2 sebesar 0,930 menunjukkan bahwa efisiensi PAD pada Pemkab Mamuju Utara dapat dijelaskan oleh variabel independen yaitu rasio kemandirian, rasio efektifitas, dan rasio pertumbuhan sebesar 93%. Sedangkan sisanya pertumbuhan sebesar 93%. dijelaskan oleh variabel lain di luar model.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dibahas pada bab sebelumnya, maka peneliti dapat mengambil beberapa kesimpulan sebagai berikut :

1. Kinerja keuangan daerah Pemkab Mamuju Utara dalam delapan tahun terakhir terbukti baik. Hal ini dapat dilihat melalui perhitungan rasio kemandirian, rasio efektivitas, dan rasio pertumbuhan dari tahun 2009-2016.
2. Efisiensi PAD Pemkab Mamuju Utara dalam delapan tahun terakhir terbukti efisien. Hal ini dapat dilihat melalui perhitungan rasio efisiensi PAD dari tahun 2009-2016.
3. Secara parsial, rasio kemandirian Pemkab Mamuju Utara berpengaruh signifikan terhadap efisiensi PAD pada delapan tahun terakhir (2009-2016).
4. Secara parsial, rasio efektivitas Pemkab Mamuju Utara tidak berpengaruh signifikan terhadap efisiensi PAD pada delapan tahun terakhir (2009-2016).
5. Secara parsial, rasio pertumbuhan Pemkab Mamuju Utara tidak berpengaruh signifikan terhadap efisiensi PAD pada delapan tahun terakhir (2009-2016).
6. Secara simultan, rasio kemandirian, rasio efektivitas, dan rasio pertumbuhan berpengaruh signifikan terhadap efisiensi PAD pada delapan tahun terakhir (2009-2016).

5.2 Saran

Berdasarkan hasil analisis rasio dan uji hipotesis kinerja keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Mamuju Utara serta beberapa kesimpulan yang telah dibuat, maka peneliti dapat memberikan saran-saran yang sekiranya bisa dipertimbangkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Mamuju Utara dalam rangka meningkatkan kinerja keuangannya, antara lain:

1. Pemerintah Daerah Kabupaten Mamuju Utara dapat menggunakan analisis rasio keuangan untuk melakukan penilaian dan evaluasi kinerja untuk kepentingan manajemen birokrasi pemerintahan serta untuk menambah kualitas sistem informasi keuangan daerah.
2. Lebih mengoptimalkan sumber-sumber PAD yang ada maupun yang belum diolah agar dapat meningkatkan PAD sehingga ketergantungan terhadap sumber dana ekstern dapat diminimalisir.
3. Pemerintah Daerah Kabupaten Mamuju Utara diharapkan dapat meningkatkan kemampuan semua pihak yang terlibat dalam penyusunan laporan keuangan, baik itu dengan memberikan bimbingan teknis dan pelatihan mengenai pengelolaan keuangan daerah ataupun dengan melakukan perekrutan pegawai yang ahli dalam bidang keuangan. Dengan begitu diharapkan penyusunan laporan keuangan dapat berjalan dengan lancar dan tepat waktu sehingga memudahkan penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. (APBD).
4. Untuk peneliti selanjutnya, diusahakan agar sampel penelitian yang diambil dibedakan dari penelitian ini. Mungkin dengan berbedanya sampei penelitian

yang diambil, maka variabel rasio efektivitas dan rasio pertumbuhan dapat berpengaruh signifikan terhadap efisiensi PAD. Meskipun dalam penelitian ini ternyata variabel tersebut tidak signifikan terhadap efisiensi PAD.



DAFTAR PUSTAKA

- Bastian, Indra, 2012 *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: ANDI.
- Halim, Abdul. 2011. *Akuntansi Keuangan Daerah*. Jakarta: Salemba Empat.
- Darsono dan Ashari. 2004. *Pedoman Praktis Memahami Laporan Keuangan*. Yogyakarta: ANDI.
- Ghozali, Imam 2009. *Ekonometrika: Teori, Konsep dan Aplikasi dengan SPSS 17*. cemarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- [http://beta.fajar.co.id/read-20110912212451-bpk-temukan-dana-bermasalah-rp-m-](http://beta.fajar.co.id/read-20110912212451-bpk-temukan-dana-bermasalah-rp-m)
- Kieso, Donal E., dkk. 2012. *Intermediate Accounting*. (Diterjemahkan Oleh: Gina Gania dan Ichsan Setiyo Budi). Jakarta: Erlangga.
- Lembaga Administrasi Negara dan BPKP. 2000. *Akuntabilitas dan Good Governance: Modul Sosialisasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan*. Jakarta: LAN dan BPKP.
- Mardiasmo. 2012. *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta: ANDI.
- Nordiawan, Deddi, dkk. 2012. *Akuntansi Pemerintahan*. Jakarta: Salemba Empat.
- Pemerintah Kabupaten Mamuju Utara. Peraturan Bupati Mamuju Utara No. 26 Tahun 2008 tentang Tugas, Fungsi, dan Rincian Tugas Jabatan Struktural pada DPPKAD Kabupaten Mamuju Utara.
- Republik Indonesia. *Undang-Undang No. 22 Tahun 1999* tentang Pemerintah Daerah.
- _____ *Undang-Undang No. 25 Tahun 1999* tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.
- _____ *Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2005* tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.
- _____ *Peraturan Pemerintah No. 54 Tahun 2005* tentang Pinjaman Daerah

_____ *Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006* tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

